



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 134 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi LKPP;
  - b. Melaksanakan program dan kegiatan yang terlingkup dalam proses Reformasi Birokrasi LKPP;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi LKPP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab setiap anggota Tim.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan September 2015.
- KEENAM : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK BPOT LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 134 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Tim pengarah	1. Agus Rahardjo	-
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	-
		3. Robin Asad Suryo	750.000
		4. Agus Prabowo	750.000
2	Ketua	1. Salusra Widya	650.000
3	Tim Pelaksana	1. Dwi Wahyuni K	500.000
		2. Dharma Nursani	500.000
		3. Setya Budi A	-
		4. Rita Berlis	500.000
		5. Gusmelinda Rahmi	500.000
		6. Gatot Pambudhi P	500.000
		7. Fadli Arif	500.000
		8. Tatang Rustandar Wiraatmadja	500.000
		9. Reifeldi	500.000
		10. Sarah Sadiqa	500.000
		11. Dade Nursahid AY	500.000
		12. Emin Adhy M	500.000
		13. R Fendy Dharma Saputra	500.000
		14. Jhon Piter Halomoan Situmorang	500.000
		15. Ida Poespita	500.000
		16. Iwan Herniwan	500.000
		17. Windy Dian T	500.000
		18. Raden Ari W	500.000
		19. Hardi Afriansyah	500.000
		20. Tjipto Prasetyo N	500.000
		21. Selamat Budiharto	500.000
		22. M Aris Supriyanto	500.000
		23. Hermawan	500.000
		24. Hafiz Ashadi	500.000
		25. Zulhenny	500.000
		26. Erwin Sondang S	500.000
		27. Ria Agustina N	500.000
		28. Patria Susantosa	500.000
		29. Irawaty Imran	500.000
		30. GAA Diah Ambarawaty	500.000
		31. M Iskandarsyah	500.000
		32. Yulianto Prihandoyo	500.000
		33. Dwi Satrianto	500.000
		34. Suharti	500.000
		35. Mudjisantosa	500.000
		36. Eko Rinaldo Octavianus	500.000
		37. Yasip Khasani	500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
3	Tim Pelaksana	38. Mustika Rosalina	500.000
		39. Harry Sri Kahartan	500.000
		40. Arif Budiman	500.000
		41. Ichwan Fajar Harika	500.000
		42. Edi Kristiyanto	500.000
		43. Rinaldi Morintosh	500.000
		44. Desi Kartika	500.000
		45. Katriasih Dwi H	500.000
		46. Agung Widayat	500.000
		47. Anita Carollin	500.000
		48. Dian Rahmayanti	500.000
		49. Sugianto	500.000
		50. Adreng Kusuma	500.000
		51. Yohana Philip	500.000
		52. Rusli Maryadi	500.000
		53. Disty Putri R	500.000
		54. Ermawanto	500.000
		55. Tri Susanto	500.000
		56. Firmansyah	500.000
		57. Muhamad Firdaus	500.000
		58. Himawan Giri	500.000
		59. Biantri Raynasari	500.000
		60. Ilvia Restu Utami	500.000
		61. Santika Wiguna	500.000
		62. Umi Nurnaeni	500.000
		63. Ketsia Aprilianny L	500.000
		64. Deasy Rachmawati	500.000
		65. Dara Kumala	500.000
		66. Devi Yanurida	500.000
		67. Festiana Niyanti	500.000
		68. Mario Duwi Cahyo	500.000
69. Hilma Oktaviani	500.000		
70. Mukti Herlambang	500.000		
71. Ivana Suprpto	500.000		
72. Prima Salti	500.000		
73. Setiawan Rahandi Sabri	500.000		
74. Sari Melani	500.000		
75. Agita Marelia Ulfa	500.000		
76. Mita Astarti Yatnanti	500.000		
77. Setyanto Putro	500.000		
78. Hastori (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	500.000		
79. Ananda Juanse (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	500.000		
80. Raka Pamungkas (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	500.000		
81. Arry Pistawati	500.000		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

  
AGUS RAHARDJO